

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk menuju pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan. Dan pada kehidupan masyarakat saat ini, bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang menggerakkan tiap individu<sup>1</sup>. Dengan teknologi berupa transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Selain itu transportasi juga berperan

---

<sup>1</sup> Manje Agung kusmagi. 2010. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Raih Asa Sukses*. Depok. Halaman 4

sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya<sup>2</sup>.

Transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>2</sup> Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Pengangkutan Dalam Buku*. UMM Pers. Malang. Halaman 53

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas.

Meskipun terdapat aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Apa saja jenis pelanggaran yang sering terjadi? Berikut hasil jajak pendapat Litbang KORAN SINDO terhadap 400 responden<sup>3</sup>.

### **1. Menerobos Lampu Merah**

Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas

---

<sup>3</sup> Koran Sindo, *Pelanggaran Lalu Lintas yang Paling Sering Terjadi*, [www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com), diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 10.39 wib

ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

## **2. Tidak Menggunakan Helm**

UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.

## **3. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan**

Pasal 107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya

sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar.

#### **4. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara**

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

#### **5. Melawan Arus (*Contra Flow*)**

Di kota-kota besar, para pengendara sepeda motor acapkali bersikap seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”.

#### **6. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas**

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

## **7. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan**

Saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalnya saja odongodong. Kendaraan ini awalnya adalah minibus. Namun kendaraan ini kemudian dimodifikasi menjadi odongodong yang penggunaannya juga tidak sesuai peruntukan sehingga membahayakan keselamatan. Mengendarai motor dengan muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaraannya dijejali dengan jumlah penumpang yang tidak sesuai kapasitas.

## **8. Tidak Menggunakan Spion**

Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat 1, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.

## **9. Berkendara Melewati Trotoar**

Seyogyanya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya, hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar sehingga

memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini banyak kampanye uang menyerukan pengembalian trotoar sebagai sarana bagi para pejalan kaki.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu di Indonesia, khususnya kota-kota besar yang menjadi tempat mobilitas dengan perkembangan kendaraan bermotor yang meningkat pesat. Salah satu contohnya adalah Kota Malang.

Di Kota Malang perkembangan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor yang demikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan juga menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata ekonomi yang bersangkutan. Dengan perkembangan kendaraan bermotor, juga mempengaruhi jumlah pelanggaran yang ada di Kota Malang. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang

tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Contohnya adalah mengenai Modifikasi Lampu Utama Kendaraan Bermotor.

Agar terlihat modis dan trendy, banyak masyarakat Kota Malang memodifikasi lampu utama kendaraan mereka dengan memakai lampu – lampu aftermarket atau memasang stiker di lampu utama mereka. Sebenarnya Lampu utama kendaraan bermotor yang telah di keluarkan oleh pabrikan sudah melalui uji coba layak jalan atau tidak. Ini di karenakan lampu yang ada di kendaraan ialah alat keselamatan yang memang harus ada guna membantu penerangan di malam hari. Belum lagi untuk saat ini penggunaan lampu utama tidak hanya untuk pemakaian malam hari saja untuk siang hari lampu utama kendaraan sepeda motor harus di hidupkan seperti yang tertuang dalam pasal 107 ayat 2 yang menyatakan bahwa “pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”<sup>4</sup>. Dengan demikian, selain di gunakan sebagai alat penerangan fungsi dari lampu utama ialah untuk alat keselamatan pengendara tersebut juga sebagai alat keselamatan untuk pengguna jalan lain. Lain halnya jika lampu utama di modifikasi menggunakan lampu aftermart dan menggunakan stiker disamping penggunaan lampu aftermart yang belum di uji kelayakan nya bisa saja cahaya yang di keluarkan lampu aftermat tersebut mengeluarkan cahaya yang bisa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



menyilaukan pengguna jalan lain sedangkan untuk penggunaan stiker bisa saja cahaya yang di keluarkan oleh lampu utama terhalangi sehingga cahaya lampu utama meredup pada malam hari yang dimana pada malam hari pengendara memerlukan pencahayaan untuk menyinari jalan. Dengan demikian, kendaraan bermotor yang dimodifikasi Lampu utamanya merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini di tegaskan di dalam Pasal 285 ayat 1 UULLAJ yang menentukan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kanlpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”<sup>5</sup>.

Namun kenyataan sehari-hari di Kota Malang banyak sekali pihak penegak hukum yang berwenang yaitu Polisi membiarkan pelanggaran yang bersangkutan dengan pasal 285 UULLAJ terjadi. Bahkan tidak ada penegakan hukum maupun peringatan oleh Polisi kepada pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran mengenai modifikasi lampu utama kendaraan bermotor.

Untuk itu pihak Kepolisian sebagai penegak hukum harus bisa menegakkan hukum yang ada dalam pasal 285 UULLAJ sebagai bentuk dari

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Berkaitan ketertiban dan keamanan Prof. Dr. Walter C. menyatakan bahwa :

“Baik buruknya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat suatu negara paling tidak dipengaruhi lima hal yaitu : Bagaimana sistem dan organisasinya kepolisian, Bagaimana sistem hukumnya, Bagaimana peradilan, Bagaimana sistem birokrasinya dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukumnya, serta Bagaimana partisipasi masyarakat”.<sup>6</sup>

Maka dari itu perlu adanya peran dari pihak kepolisian untuk terselenggaranya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena memang fungsi dari Kepolisian itu sendiri adalah menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>7</sup> Sehingga untuk terciptanya dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat peran kepolisian sangatlah penting.

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang dan fakta-fakta di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Sehingga untuk

---

<sup>6</sup> Anton Tabah. 1993. Patroli Polisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halaman 1

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat terlaksana kepastian hukum dan penegakan hukum, penulis mencoba mengangkat penelitian dengan judul

**“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEMASANGAN LAMPU LED ATAU HID FARIASI (MODIFIKASI LAMPU UTAMA )”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu LED Atau HID Fariasi (modifikasi Lampu Utama)?
2. Kendala apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu LED Atau HID Fariasi (modifikasi Lampu Utama) dan solusinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu LED Atau HID Fariasi (modifikasi Lampu Utama).
2. Untuk mengetahui Kendala - kendala Kepolisian dalam pelaksanaan pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pemasangan Lampu LED Atau HID Fariasi (modifikasi Lampu Utama).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu Fariasi/aftermarket (modifikasi lampu utama kendaraan bermotor) khususnya pasal 285 yang nantinya akan menjadi acuan bagi penegak hukum dan bagi peneliti yang selanjutnya. Dan penulisan ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **2. Bagi Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang baik bagi penegak hukum yang berkepentingan dalam efektifitas pelaksanaan

pemasangan lampu HID atau LED fariasi (modifikasi lampu utama ) dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Malang.

### 3. Bagi Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas dan masyarakat pengguna kendaraan bermotor mengetahui fungsi dari Lampu Utama Kendaraan Bermotor.

## **E. Kegunaan Penulisan**

Penelitian ini berguna untuk memberi sumbangsih dan masukan kepada penegak hukum mengenai efektifitas pemasangan lampu utama kendaraan bermotor Dimana undang-undang ini dibentuk dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap mengadakan penelitian tidak terlepas dari penggunaan metode-metode dalam penulisan skripsi, dengan mempermudah penelitian itu maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan melihat hukum sebagai perilaku hukum dalam masyarakat<sup>8</sup>. Sehingga ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti kinerja pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan berlalu lintas terhadap pelaksanaan pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu HID atau LED Fariasi (Modifikasi Lampu utama).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Malang Kota. Lokasi dalam penelitian ini antara lain beberapa ruas jalan yang ada di Kota Malang seperti: Jalan Tlogo Mas, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Besar Ijen dan Jalan Kawi. Peneliti ini juga meneliti di beberapa area parkir yang ada di Kota Malang antara lain: area parkir Universitas Muhammadiyah Malang Kampus 3, area parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan area parkir Museum Brawijaya Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena lokasi yang penulis pilih sangat ramai dan padat oleh para pengguna kendaraan bermotor sehingga berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dan di Kota Malang banyak sekali masyarakat yang melanggar

---

<sup>8</sup> Pedoman Penulis Hukum.2012. Fakultas Hukum UMM. Malang. Halaman 18

lalu lintas yang berkenaan dengan efektifitas pelaksanaan ketentuan tentang pemasangan Lampu LED atau HID fariasi (Modifikasi Lampu Utama).

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan. Sehingga penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian atau sumber data yang penulis peroleh dari Kepolisian, Pengguna kendaraan yang memakai lampu LED atau HID fariasi (Modifikasi Lampu Utama), Penjual Lampu LED atau HID fariasi dan didapatkan dengan terjun langsung ke tempat lokasi yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan ketentuan tentang pemasangan Lampu HID atau LED Fariasi (Modifikasi Lampu utama) Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2017 – Juli 2017.

#### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder yang peneliti peroleh dari dokumen-dokumen, literature, peraturan perundang-undangan, majalah serta revensi yang berkaitan dengan penulis teliti dan bahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Observasi

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan langsung pada sumber utama yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan ketentuan tentang pemasangan Lampu HID atau LED Fariasi (Modifikasi Lampu utama) di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

## 2. Wawancara/interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada sumber utama penelitian dengan cara tanya jawab kepada pihak terkait, yaitu :

- a. Pihak Kepolisian Satuan Lalu lintas Polresta Malang antara lain :
  1. AKP Bambang Cristanto ( Unit Umum Satuan Lalu Lintas )
  2. Briptu Adi Chandra (Unit administrasi Satuan Lalu Lintas)
- b. Pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan Lampu LED atau HID fariasi (Modifikasi Lampu Utama) antara lain:
  1. Nugroho Saputro
  2. Muhammad Firdaus
  3. Edi Susanto
  4. Aris
  5. Heri
  6. Luqman Rudianto
  7. Alcherrys Siswanto
  8. Ahmad Amrullah
  9. Frans Cristian



#### 10. Choirul Imam

##### c. Penjual Lampu LED atau HID Fariasi ( Toko Fariasi Motor)

1. Andik Rahardian, beralamat di Jalan Galunggung Kota Malang
2. Rudy Andika, beralamat di Jalan Galunggung Kota Malang
3. Alex Soeprapto, beralamat di Jalan Raya Dieng Kota Malang

#### 3. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan ketentuan tentang pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor antara lain : undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor](#), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

#### 4. Analisa Data

Teknik yang dipakai oleh penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah menggunakan analisa kualitatif, artinya uraian yang penulis lakukan terhadap data hasil penelitian tidak menggunakan angka-angka

dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan mulai dari Bab I sampai bab IV, dengan uraian secara garis besar sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab pendahuluan ini memuat dan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai teori-teori maupun kaidah-kaidah yang berumber dari peraturan perundang-undangan maupun literature-literature yang akan digunakan untuk mendukung analisa berkaitan dengan peran penegak hukum yaitu Kepolisian agar terciptanya dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan yang berisikan penjelasan dan memaparkan data-data hasil penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisis penulis terkait dengan efektifitas pelaksanaan pasal 285

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu Fariasi (modifikasi Lampu Utama).

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat dan diteliti oleh penulis mengenai efektifitas pelaksanaan pasal 285 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan Lampu Fariasi (modifikasi lampu utama).